



Notulen Pertemuan Lanjutan Pembahasan Bab III (Rencana Strategis Pengelolaan gurita) dalam Dokumen RPP Gurita

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Februari 2025
Tempat : AONE Hotel Jakarta
Waktu : 09.00 - Selesai WIB

[TOR Kegiatan](#)

[Undangan](#)

[Dokumentasi Kegiatan](#)

Peserta Kegiatan

[\(Link to Daftar Hadir\)](#)

Sambutan dan Pemaparan Progress

Sambutan Direktur YPL (Dina Kosasih)

- RPP Gurita ini sudah mengalami rangkaian proses yang cukup panjang, di mulai dengan beberapa tahapan pemantapan di tingkat tapak yang telah di mulai pada sekitar tahun 2022 yang lalu
- Kami ucapkan terimakasih banyak kepada Bapak/Ibu sekalian yang telah berkolaborasi bersama dalam mengembangkan dan merumuskan RPP Gurita ini dalam menuju keberlanjutan
- Adapun fokus pembahasan kita dalam pertemuan kali ini adalah menajamkan dan menyepakati nilai angka sasaran matriks rencana kerja RPP Gurita, sehingga diharapkan dapat menghasilkan dokumen RPP yang lebih siap untuk tindak lanjut kedepannya

Sambutan dan Arahan Katimja LPTK - PSDI, DJPT, KKP (Ferry S.)

- Komoditas gurita coba kita masukkan sebagai salah satu target yang perlu ada pengelolaannya dengan kita usahakan untuk mendapatkan dukungan dari peluang pendanaan lain, seperti kolaborasi saat ini

- RPP akan dilegalkan dalam keputusan menteri sebagaimana amanat dalam UU perikanan dan perangkat hukum turunannya. Adapun tujuan dari RPP ini disusun untuk acuan dalam mencapai keberlanjutan perikanan
- Sebagaimana juga yang tertera dalam dokumen RPJMN yang baru telah tersedia, dan juga salah satu mandatnya adalah penyusunan RPP
- RPP sebagai pegangan bersama dalam pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan yang mana dokumen RPP ini dapat dikembangkan baik berdasarkan wilayah atau komoditas perikanan tertentu
- Sebagai bentuk dari turunan RPP, pengembangan dari Harvest Strategy sebagai bentuk turunannya sebagai acuan tingkat pemanfaatan yang diperbolehkan. Kita sudah memiliki Harvest Strategy seperti kakap dan kerapu, serta rajungan di 4 WPP (711, 715, 717, 718). RPP ini berlaku 5 tahun, artinya 2026 harus ada RPP yang baru dari komoditas kakap-kerapu yang perlu untuk di review evaluasi untuk perbaikan
- Gurita termasuk dari komoditas ekonomis penting dengan produksi cukup besar ke 4 dari total produksi perikanan di Indonesia ke pasar ekspor. RPP Gurita ini bermulai di tahun 2022, hingga terakhir pertemuan pembahasan RPP ini dilaksanakan di Makassar 8 Agustus 2024
- Gurita terbanyak produksinya dari Selat Malaka menurut data statistik PUSDATIN, namun setelah diselidiki adalah jenis gurita yang kecil (baby octopus) yang memang berbeda jenis, ukuran memang kecil berbeda dengan gurita biru yang sebagian besar dibahas dalam RPP ini
- Sebenarnya untuk RPP Gurita Bab III ini sudah ada, namun perlu ada angka yang perlu diisikan dan disepakati, sesuai arahan dari Biro Hukum yang mana harus terukur. Seperti patokan di PSDKP adalah jumlah SLO yang diberikan, dan perlu disebutkan berapa besar angka target yang akan dicapai dalam pelaksanaan RPP ini
- Dokumen RPP yang sudah melalui proses ini, kemudian masih perlu untuk diparaf oleh seluruh Eselon 1 sebelum di tanda tangan Menteri KP
- Disisi lain, ecolabelling menjadi salah satu hal yang penting untuk coba dilaksanakan guna perbaikan perikanan melalui beberapa pendekatan indikator. Pre Assessment MSC untuk gurita sendiri di Sulawesi sudah dilakukan pada tahun 2021, HS dan HCR menjadi salah satu temuan yang perlu di kejar dalam proses FIP, karena ini juga akan masuk dalam dokumen RPP Gurita. HS dan HCR menjadi pembelajaran sebelumnya terkait dengan legalitas yang pas untuk operasionalisasi HS & HCR.
- Harapan dari Bapak/Ibu sekalian untuk dapat berkontribusi dan menyepakati bersama terutama pada hari ini kita akan fokus dalam Bab 3, terkait Rencana Aksi.

Diskusi Sesi 1

Moderator: Rizal Rifai

Kita bersama secara langsung membahas matriks dari rencana pengelolaan gurita, serta langsung berdiskusi dengan unit satuan kerja terkait ya. Sehingga kita dapat menyepakati angka sasaran sebagai acuan yang terukur, termasuk sasaran waktu. Ini disepakati sesuai dengan kemampuan pada satuan kerja masing-masing.

Tujuan 1

Memastikan stok sumberdaya gurita terjaga pada tingkat yang berkelanjutan

Sasaran 1

BRIN - Duranta Kembaren.

- Dulu cenderung menurun, nah namun terkait dengan CPUE ini belum tentu, apakah saat ini stabil, atau malah meningkat. Sehingga dalam pengusulan pada rencana kerja ini sebaiknya ditulis untuk tidak terkunci pada angka, karena nanti didetailkan pada dokumen Harvest Strategy (HS) nya saja. Jadi pakai kata "**CPUE stabil**" lebih pas

PSDI - Aris Budiarto

- Kalau ukurannya adalah CPUE tidak menurun atau stabil, minimal status quo, jadi langkah-langkah mempertahankan udah baik. Namun di gurita ini pelaksanaan *log book*nya belum ada, sehingga nanti lebih mengarah kepada kita apakah bisa **mengendalikan upaya penangkapan**. Trip terlalu spesifik.

PSDKP - Asep Supriadi

- Saya coba yang pertama dulu, terkait dengan upaya, karena kapal di bawah 5GT ini tidak terkontrol, kami berharap data dari Pemda terkait dengan jumlah nelayan guritanya, sehingga tiap Provinsi atau Kabupaten untuk mendata nelayan gurita. Apakah mereka ini perorangan atau sudah memiliki usaha bersama dengan pengusaha lain. Ada juga kepercayaan yang mempercayai bahwa gurita ini menjadi makanan untuk mendukung kehamilan.
- Yang berhubungan dengan wilayah pesisir adalah dari DKP atau Provinsi, namun PSDKP dalam 2025 hanya 28 hari dalam setahun untuk melakukan pengawasan, untuk fasilitas secara umum, kami memiliki speed boat yang beroperasi selama 22 hari selama 1 tahun. Terkait dengan kondisi yang minim dalam patroli laut, kami akan meminta pada pengawas perikanan untuk dapat melakukan pengawasan di pantai, bekerjasama dengan DKP dan POKMASWAS.

DitKAPI - Lingga

- Memang Gurita ini sudah masuk KBLI, namun belum ada kuota untuk perikanan terukur. Terkait dengan gurita ini ada potensi konflik sosial terutama penangkap gurita dengan menggunakan pots (bubu), yang mana wilayah penangkapannya overlapping dengan yang lain terutama pada wilayah Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan.
- Kita juga perlu tentukan untuk RPP ini kita masih mempertahankan dengan menggunakan WPP atau Zona Perikanan Terukur
- Dalam aturan kami, untuk penyebutan WPP itu adalah Zona PIT dulu kemudian WPP. Sehingga dapat lebih tersinkronisasi dan rapi.
- Saya sepakat dengan Pak Asep kita tidak tahu berapa banyak kapal disitu, kita tidak punya data sebenarnya berapa banyaknya, dan tergelitik apa yang kita capai dalam gurita, apakah meningkatkan produksi atau bagaimana, ini ada rekan-rekan dari PDS, dari analisis pasar bagaimana peluang Gurita ini, serta berapa total maksimal yang bisa ditangkap. Ini sejalan dengan kapasitas tangkap yang cocok.

PSDI - Rizal Rifai

- Jadi memang mandatnya kita ini tertuang di PP 27, yaitu WPP, namun kita integrasikan dengan PIT, seperti zona 573 itu Zona 4, 713 itu Zona 6, 714 Zona 3, dan 716 Zona 2.

LINI - Gayatri

- Operasionalisasi penangkapan gurita, paling jauh mereka akses pada Jalur 1B, daerah Sulawesi tidak ada yang diluar dari 12 mil, perahunya sangat kecil seperti kayo, lebih tepat disebut kanoe.

PSDI - Rizal Rifai

- Di Bab 2 pada bagian RPP ini, itu ada terkait dengan konflik wilayah, terutama potensi konflik lokasi penangkapan gurita.
- Selanjutnya yaitu ke pemantauan CPUE apakah bisa tercapai di WPP ini?

PSDI - Faridz Fachri

- Kami dari konsorsium FIP Gurita mencoba menkonsolidasikan pendataan tersebut dengan para mitra. Saat ini pendataan gurita pada WPP tersebut masih dan sedang berjalan.

PSDI - Arinta

- Terkait dengan nomor 3, di log book sendiri belum ada data gurita, kemudian pemantauan gurita kan berjalan dengan mitra konsorsium, dan apakah 2029 pendataan yang masih berjalan.

LINI - Gurita

- Yang jelas FIP ini sampai 2027 akan ada pendataan, karena ini direview dalam 5 tahun, namun kita inginnya pendataan ini dilakukan oleh enumerator yang menjadi bagian dari supply chain, sehingga harapannya project ini berjalan dengan terus meski ketika project selesai tetap jalan.

PSDKP - Asep Supriadi

- Memang pengawasan saat ini berfokus pada pelabuhan atau dermaga, jika RPP ini sudah jadi tugas dapat dimasukkan pada satuan pengawasan-pengawasan, yang diusahakan untuk menjadi kegiatan pengawasan tahunan.

Biro Hukum

- Mungkin ini hanya redaksional saja, Kata regulasi sesuai Jalur Penangkapan, mungkin redaksionalnya disesuaikan. Karena kalau tertulis regulasi, itu regulasi yang mana. Sebaiknya regulasi dihapus langsung pada implementasi dan pengawasan pelaksanaan jalur penangkapan ikan .
- Sama langsung pada poin selanjutnya melakukan monitoring sebanyak berapa kali.

PSDI - Rizal Rifai

- Siap terimakasih, cukup untuk tujuan 1 Sasaran 1, dapat kita bungkus.

Sasaran 2 & 3

PSDI - Aris Budiarto

- Sebenarnya gurita ini kuotanya sudah kami dihitung, namun gurita termasuk yang relaksasi di pending, sejatinya sudah ada namun karena belum ditetapkan, sehingga penetapan dalam kuota jenis ikan ini semua. Kita dalam waktu dekat Gurita memiliki potensi dan JTB sendiri akan jadi lebih baik untuk kuota. Karena menghitung gurita saat ini dari data produksi selama 10 tahun di rata-rata namun pada data produksi terbesar.
- Jadi dari KKP pusat menetapkannya adalah per Provinsi, karena gurita ini antara 0-12 mil tidak ada yang ke pusat. Kuota ini tidak dibagikan person to person namun per instansi pelaku usaha.
- Lokasinya target untuk kuota menyesuaikan provinsi yang ada di WPP sebagaimana tercantum pada sebelumnya.

PSDI - Arinta

- Kalau melihat kondisi saat ini, 2 tahun relaksasi penentuan kuota, apakah dikembalikan lagi ke tim PSDI apakah jadi sasaran ini detail sampai provinsi atau target awalnya ada dulu kuota nya.

PSDI - Aris Budiarto

- Berarti nanti kalimatnya diubah jadi per zona per WPP per Provinsi.

PSDI - Rizal Rifai

- Yang penting RPP ini realistis dalam 5 tahun dapat tercapai

Biro Hukum

- Terkait dengan pengaturan yang baru, tadi di awal kan RPP nya memiliki 4 target, tentunya dalam 5 tahun depan apakah hanya di WPP tersebut atau nasional Indonesia.
- Mungkin penulisannya yang diperbaiki, jangan banyak terlalu koma namun satu tarikan nafas.

PSDI - Aris Budiarto

- Penetapan kuota ini terpisah dengan RPP, karena penetapan kuota ini untuk seluruh Indonesia.

BBPMHP

- Ada sedikit masukan, dalam rencana aksi ada pelibatan untuk kuota pelaku nelayan, misalkan disampaikan YPL, ada kendala perizinan dalam kapal 5 GT, kapal di bawah 5 GT susah megurus CPIB kapal. Misal kapal 5GT ini untuk dapat kuota apa saja yang harus disiapkan?

PSDI - Aris Budiarto

- Jadi untuk pembagian kuota ini adalah dasarnya ada 2, yakni *historical catch* dan produktivitas, jadi gurita ada beberapa alat tangkap, berarti berapa alat ini menangkap gurita dalam 1 tahun, jadi kuota ini diberikan 1 tahun musim

penangkapan. Nanti akan banyak enumerator dalam pelabuhan, takutnya pengusaha untuk mencatat lebih kecil.

- Nanti di awal penerapan masih belum sanksi kuota, jadi perlu register kapal ini sebelum kuota dilaksanakan, harusnya NPWP mudah, seharusnya jangan sampai jadi penghalang ya. Pendampingan memang perlu didampingi nelayan.
- Semuanya sesuai PP5, berbasis resiko, kesulitannya kuota ini ketika upaya lebih besar daripada SDI ya, karena perlu mengurangi kapal.

PSDI - Rizal Rifai

- Siap aman untuk masukannya kita dapat bungkus untuk ke poin selanjutnya.

Sasaran 4-6

BRIN - Duranta

- Karena Gurita ini berbeda dengan ikan bersirip dan crustacea yang mana ukuran mereka pasti, namun untuk gurita kalau belajar dari perikanan gurita di luar, untuk terkait minimum legal size itu kurang efektif untuk gurita apalagi alat pancing, jika ini dipertahankan ya bisa saja dari matang gonad kemudian ditetapkan. Karena hasil tangkapan pancingnya survivalnya sangat rendah.

LINI - Gayatri

- Pengelolaan dalam buka tutup, itu lebih tetap untuk mengatur gurita, namun bukan ukuran.

PSDI - Rizal Rifai

- Nah benar ini jadi pertanyaan, ini untuk efektifitas pengelolaannya atau ke ukuran layak tangkap, apakah dibuat umum atau spesifik kesini. Karena ada 3 tahap, validasi pendataannya, proses penyusunannya dan penetapan. Terfasilitasinya proses manajemen perikanan gurita.

BRIN - Duranta

- Saya sepakat lebih general atau umum saja, karena di lapangan itu lebih banyak dilakukan penutupan sementara, namun justifikasinya apa, seperti ukuran kecil ditutup atau seperti apa harus cukup kuat dalam penentuannya.
- Ini kaitannya dengan indikator pada tujuan berikutnya, karena ini sepertinya bisa di sinkronkan, karena saya secara pribadi lebih cocok seperti itu. Terus distribusi ukuran secara spasio temporal, saya rasa ini lebih efektif untuk gurita.

Tujuan 2

Menjamin habitat dan lingkungan perikanan gurita yang sehat dalam mendukung keberlanjutan stok di alam

Moderator: Ferry Sutyan, PhD

Sasaran 1-3

P4K

- Ada beberapa hal yang kami tanyakan dari kami, ada rencana 4 aksi
 - a. Monitoring

b. Penyardartahuan

c. Informasi ilmiah

- Mohon informasinya apakah RPP nantinya bersifat mandatory?
- Kemrin kita telah menyusun detail IGT lamun dan terumbu karang, rencana diterbitkan pada tahun ini, semoga masih tercapai pada tahap ini. Apakah ini bisa disebut sebagai monitoring, untuk lokasi monitoring gurita ini apakah ada di kawasan konservasi atau bukan, karena TUSI nya lebih ke KEBP, di kami fokus mangrove. Sehingga perlu ada peran dari Direktorat PRL terkait perizinan PKRL.

PSDI - Rizal

- Terkait dengan rencana aksi, kalau yang tertuang di RPP nantinya jadi mandatori, sehingga kita butuh masukan cara realistis untuk masing-masing tanggung jawab.
- Harusnya IGT bisa jadi landasan dalam monitoring lamun dan terumbu karang dalam penganggaran.
- Jadi ini sebagai informasi pemetaan IGT (dan bisa masuk dalam monitoring).

PSDI - Arinta

- Apakah terkait dengan RPP ini cukup OK karena ada menambahkan yang baru mengingat PIC kerja belum ada disini, mengingat RPP ini akan mandatori, dan akan menjadi evaluasi inspektorat.

LINI - Gayatri

- Sedikit menambahkan, 14 lokasi di lokasi dampingan di Sulawesi itu ada manta tow untuk pemantauan habitat, yang seharusnya bisa sumbangsih dalam EVIKA, terutama lokasi yang berada dalam kawasan.

PSDI - Arinta

- Mending kita sesuaikan dengan sasaran sebelumnya, dengan menyebutkan WPP target seperti di bagian awal.

PSDI - Rizal Rifai

- Terkait dengan konservasi dan rehabilitasi, terutama untuk terumbu karang dan lamun, kemudian ini perlu disepakati apakah hanya fokus dikonservasi atau tanpa rehabilitasi.

P4K

- Mungkin bisa konservasi dan atau rehabilitasi

Tujuan 3

Meningkatnya manfaat ekonomi perikanan gurita bagi pelaku usaha perikanan khususnya untuk kesejahteraan nelayan

Moderator: Ferry Sutyan, PhD

Sasaran 1-6

PSDI - Ferry S.

- Masuk pada bagian sosial ekonomi, pada bagian pertama ini kita bisa katakan sebagai contoh apabila 1000, berarti jika target 25% adalah 250 nelayan dalam 5 tahun. Sehingga tidak terlalu berat.
- SKN DitKAPI hingga saat ini sebagai PIC dalam hal ini.

Puslatluh

- SKN istilahnya para nelayan sudah kompeten dalam praktek namun tidak memiliki SIM, fungsi SKN ini adalah sertifikasi. Sertifikasi yang berfungsi sebagai pegangan kecakapan nelayan.

BPPMHP

- Kalau SKN ini sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BPRSDMKP, kalau sertifikat bimtek semacam memberikan informasi atau sosialisasi. Apakah BPRSDMKP memberikan keringanan prosesnya.

PSDI - Ferry S.

- Memang proses SKN ini perlu dibuat simpel misal jadi 1 hari saja, tidak sampai 2 hari.

Puslatluh

- Untuk SKN ini, mereka itu sudah kompeten cuman tidak memiliki kompetensi.

DitKAPI - Lingga

- Kebetulan waktu menyusun dokumen SKN nya tujuan adalah nelayan aman dan selamat dalam menangkap ikan. Dulu dibuat cukup singkat.
- Jangan sampai nelayan itu keluar uang untuk sertifikat tersebut.

LINI - Gayatri

- Ada yang sudah dan belum untuk pelatihannya dalam financial inclusion. Hingga tahun 2024, sudah dilaksanakan program capacity building financial inclusion di 14 lokasi. Dan untuk pengelolaan pelatihan kualitas pasca penangkapan perikanan gurita pada 14 lokasi.

PDS

- Sekarang kita mendapatkan TUSI baru, bagaimana para pelaku usaha bisa mencapai HACCP. Kita bisa membina pelaku usaha untuk menerapkan pengolahan dan penanganan yang baik. Kita dalam kondisi 5 tahun ini bisa kita lakukan dengan zoom.

PSDI - Ferry S.

- Sebanyak program capacity building di 14 lokasi. OK?

PDS

- Sekarang, saat ini kita melakukan pelatihan untuk memberikan pelatihan dasar kepada nelayan, sedangkan diversifikasi produk belum fokus ke gurita, namun masih yang lain. Namun jika ada spesifik gurita kita akan didiskusikan dengan tim pimpinan jika ada pelatihan gurita. Agar nelayan bisa memenuhi standard mini plant.

Kecenderungan gurita karena berukuran besar, karena di data karantina ada telur gurita kering. Apakah ini masih diizinkan atau tidak.

BBPMHP

- Jika masuk dalam TUSI, masuk dalam mana pelatihan ini?

PSDI - Ferry S.

- Nanti untuk pelaksanaan anggarannya kita pasang positive thinking untuk anggarannya bisa bersama.

BBPMHP

- Tidak ada aktivitas pembinaan, namun pengawasan. Untuk memastikan audit. CPIB supplier dulu TUSI kami, sekarang CPIB supplier dicabut, CPIB ganti nama jadi SPBI. Namun jika butuh tenaga kami, bisa bekerjasama dengan inspektorat mutu.

PDS - Dian

- Kita bekerjasama, seperti workshop gabungan, seperti bagaimana nelayan ini hanya untuk penanganan saja, atau sampai dalam pengolahan dan pengembangan produk.
- Terkait dengan standar bahan baku nya bagaimana bisa mencukupi dan sesuai dengan standar industri.
- Sampai dengan bulan Februari ini sudah membuat pelatihan.

PSDI - Ferry S.

- Ada berapa KUSUKA nelayan gurita?

PUSDATIN

- KUSUKA hanya sampai alat tangkap, tidak mencatat hingga pada komoditas.

SFP - Dessy

- Nelayan gurita sekitar 600 nelayan di bawah dari FIP kami.

PSDI - Ferry S.

- Dalam hal NIB, Pas Kecil, eBKP, BPJS Ketenagakerjaan perlu gerai agar tidak bolak balik nelayannya, sehingga prosesnya dapat sekali jalan.

BBPMHP

- Pas Kecil KSOP di Surabaya uji petik tercatat proses untuk pas kecil dengan KSOP.
- Kita butuh bantuan juga untuk teman pendampingan dalam kelengkapan dokumen pas kecil dll sehingga tidak bisa mendapatkan CPIB.

DitKAPI - Lingga

- Ketentuan mengenai eBKP PemrnKP 33 - PP27/2021. Tapi dalam permen KP 3-BKP untuk semua ukuran kapal, memang syaratnya adalah pas kecil dari KSOP. Karena kita perlu koordinasi dengan pemda juga. Karena Pemda berperan dalam mengumpulkan kapal yang belum memiliki pas kecil.
- Kita harus komitmen dengan nelayan bahwa hari ini akan ada gerai dan tidak melaut.

- Sebenarnya untuk BPJS itu bukan IKU nya DitKAPI, tapi gpp kalau kita mendorong untuk mereka, meski tidak harus ke BPJS.

Biro Hukum

- Terkait dengan redaksi, ini ada asuransi nelayan, jika mengacu pada UU 7 perlindungan, itu nomenklaturnya asuransi perikanan.
- Apakah BPJS ketenagakerjaan ini bisa ditambahkan BPJS kesehatan?

PSDI - Ferry S.

- Ini RPP sudah disusun dari tahun 2022, jika memang ada perubahan bisa juga di ubah.

Biro Hukum

- Karena untuk Bantuan Pemerintah ini nelayan gurita punya potensi itu.

DitKAPI - Lingga

- "Dokumen kapal perikanan" redaksional diganti
- Permen KP 33 - jaminan sosial ketenagakerjaan, kalau menurut saya di ruang lingkup kita, hanya cukup disini saja, karena Impres menunjukkan bahwa setiap masyarakat wajib memiliki JKN dalam penerimaan bantuan

Biro Hukum - Wendi

- Kalau dari kami kita kembalikan dari rekan-rekan teknis, yang penting ada data atau acuan yang disepakati dan terlaksana.

PSDI - Ferry S.

- Untuk bantuan apa saja syaratnya?

DitKAPI - Lingga

- 1 aja yang punya jaminan itu sudah dapat bantuan

PSDI - Ferry S.

- OK selanjutnya kita bisa berpindah ke tujuan yang terakhir dari RPP ini.

Tujuan 4

Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perikanan gurita dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab

Moderator: Ferry Sutyan, PhD

Sasaran 1-5

PSDI - Ferry S.

- Gurita yang kecil baby gurita itu belum banyak data dan informasi hingga saat ini.

PSDI - Arinta

- Untuk komoditasnya mungkin dibikin umum aja gurita (spp).

PSDI - Ferry S.

- HS paling sedikit 1 di WPP.
- Kemudian bagaimana terkait dengan pengawasan untuk bagian yang terkait dari matriks ini.

PSDKP

- Kita melakukan pengawasannya tidak berdasarkan komoditas namun kawasan perairan.

PSDI - FerryS.

- Untuk rencana aksinya aman semua ya? Atau ada usulan kegiatan dari tim PSDKP?

PSDKP - Basri

- Terkait dengan pendampingan kelembagaan, POKMASWAS dibentuk dan dibina oleh Pemprov tapi ada juga pusat (pokmaswas kelautan)

PSDKP - Basri

- Terkait dengan POKMASWAS kita sudah memiliki POKMASWAS, yang perlu kita lakukan adalah pembinaan, ini juga ada di kami, ini apakah kita perlu bentuk lagi atau pembinaan. Karena kita telah memiliki banyaknya sekali mitra POKMASWAS.
- Jadi sebenarnya kunci itu dari masyarakat sendiri.
- Terkait dengan berkurangnya sebanyak 50% aktivitas penangkapan ikan.

PSDI - Ferry S.

- Siap setuju yang 50% mungkin diganti menjadi mengurangi aktivitas destruktif fishing.
- Aktivitas ikan yang merusak berarti destruktif fishing ya, bayangan saya gurita di pinggiran dia tipe yang dilakukan adalah penangkapan yang berada di sekitar pantai atau pesisir.
- Tentunya itu domain PSDKP di provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah.
- Syukur ini sudah kita bahas semua ya untuk penentuan nilai sasaran di masing-masing rencana aksinya. Dan masukan rekan sekalian semua akan kita rapikan, karena ini masih berantakan. Kemudian kita tim internal PSDI akan merapikan hasil dari diskusi ini, kemudian kita akan diskusikan selanjutnya, termasuk perencanaan.

Rencana Tindak Lanjut

- Tim PSDI akan merapikan matriks rencana aksi RPP hasil dari pertemuan ini, dan akan disampaikan ke rekan sekalian semua.
- Kemudian kita akan coba merencanakan untuk pertemuan lanjutan konsultasi publik sebagai tindak lanjut RPP Gurita, berkoordinasi dengan para mitra terutama dengan tim konsorsium FIP Gurita Sulawesi.
- Kemudian kita akan membahas lebih detail dengan Biro Hukum KKP untuk persiapan pengesahan lanjutannya.

Dokumentasi



